

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini fokus pada efek samping yang ditimbulkan oleh pendirian apartemen, hotel, dan beberapa tempat hiburan di daerah Kabupaten Sleman. Dengan menganalisis kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, penelitian ini menganalisis strategi dan siasat pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup akibat modernitas di Kabupaten Sleman. Dampak akibat pembangunan yang dirasakan masyarakat yaitu kurangnya debit dan kualitas air tanah, kekeringan serta kemacetan lalu lintas (Khaerulyansyah *et al.*, 2014). Pada saat ini, investor berdatangan ke Kabupaten Sleman dan berlomba-lomba untuk mendirikan hotel ataupun apartemen, mereka melihat bahwa Kabupaten Sleman merupakan tempat yang strategis selain Kota Yogyakarta. Dengan adanya banyak gedung-gedung tinggi seperti mall, hotel dan apartemen memungkinkan adanya kelunturan sosial dan budaya yang ada di daerah setempat itu.

Kabupaten Sleman berkembang karena memiliki daya tarik tersendiri bagi investor yang datang ke Sleman, maka dari itu pengembangan ataupun pembangunan hotel di Kabupaten Sleman telah berkecamuk dan saling berlomba untuk memberikan fasilitas yang istimewa. Maraknya pembangunan hotel di Kabupaten Sleman memunculkan adanya pro dan kontra terhadap masyarakat. Timbulnya masalah-masalah seperti pengelolaan limbah hotel yang kurang baik maka akan memunculkan masalah untuk lingkungan sekitar yang kedepannya akan berpengaruh buruk pada kesehatan masyarakat sekitar hotel tersebut dikarenakan air yang mereka pakai untuk kegiatan sehari-hari tercemar. Kegiatan pembangunan semakin berisiko menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan,

sehingga merusak fungsi ekosistem dan gagal beroperasi sesuai dengan tujuannya (Puspitasari, 2009).

Apabila masalah tersebut tidak segera dicari jalan keluar dan diatasi maka menimbulkan masalah lainnya sehingga akan muncul masalah yang bercabang. Oleh karena itu diperlukan adanya pengontrolan pembangunan apartemen dan juga hotel di Kabupaten Sleman. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran yang paling penting karena sebagai pemberi izin terhadap pembangunan-pembangunan tersebut. Apabila pemerintah dapat berbuat tegas dengan mengamati lingkungan sekitar proyek yang akan dibangun sebenarnya pembangunan-pembangunan tersebut berbanding dengan aturan yang berlaku dan ditetapkan sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Pembangunan hotel yang tidak terkendali menyebabkan terbatasnya ruang terbuka karena penduduk setempat cenderung menggunakan pekarangan rumah sendiri untuk membangun akomodasi komersial lainnya, seperti restoran, warung, dan berbagai jenis sarana dan prasarana lainnya (Murti & Rofi, 2017). Berikut adalah data pembangunan hotel di kabupaten yang berada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY):

Tabel 1.1

| No. | Nama | Tahun | | | |
|-----|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Sleman | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 |
| 2 | Bantul | 118,00 | 59,00 | 59,00 | - |
| 3 | GunungKidul | 170,00 | 171,00 | 170,00 | 132,00 |
| 4 | Kulonprogo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sumber: http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/212-jumlah-hotel diakses pada tanggal 01/02/2021 pukul 11.45 WIB.

Berdasarkan data pembangunan hotel tersebut, dapat dilihat bahwa pembangunan hotel di Kabupaten Sleman memiliki jumlah pembangunan yang tinggi diantara kabupaten lainnya, dikarenakan Kabupaten Sleman memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan adanya tempat wisata dan kuliner. Tidak hanya itu, Kabupaten Sleman juga memiliki daya tarik tersendiri karena terdapat beberapa kampus swasta maupun negeri. Di Kabupaten Sleman juga terdapat mall-mall besar, hal tersebut juga menjadi faktor yang mendukung wisatawan untuk berkunjung dan menginap di sana.

Pencemaran lingkungan merupakan suatu keadaan dimana kondisi asal yang telah berubah menjadi kondisi yang buruk akibat adanya bahan-bahan polutan yang ikut tercampur (Palar, 2008). Lingkungan dapat dikatakan telah tercemar apabila tatanan lingkungan yang sudah berubah tidak sama lagi dengan bentuk asalnya, hal tersebut akibat dari masuknya suatu zat berbahaya yang masuk ke dalam tatanan lingkungan. Kondisi ini mengakibatkan dampak buruk terhadap makhluk hidup yang ada, lebih lanjut pencemaran lingkungan tersebut dapat membunuh bahkan menghapuskan suatu makhluk hidup. Pencemaran lingkungan berdasarkan tempat terjadinya dapat dibagi menjadi pencemaran udara, tanah dan air (Sastrawijaya, 2009).

Pencemaran air berarti pencemar yang masuk ke dalam air dan menyebabkan perubahan sistem air, sehingga menurunkan kualitas air sampai tingkat tertentu, menyebabkan disfungsi air tidak lagi mengikuti namanya. Secara garis besar, pencemaran air disebabkan oleh pembuangan limbah-limbah cair dan limbah padat yang dibuang ke media air, baik itu laut, sungai, maupun kali (Sulistiyorini, 2009). Limbah cair merupakan limbah pencemaran alam yang bersumber dari rumah tangga dan industri, air tanah, air

permukaan dan limbah lainnya, sehingga limbah cair tergolong limbah umum (Sugiharto, 2014). Limbah air hotel adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan hotel yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan (Hendro Martono et al., 2004).

Kebutuhan air condong lebih meningkat dari masa ke masa, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia ataupun untuk sumber daya yang dibutuhkan dalam peningkatan ekonomi yang meliputi kegiatan pertanian, pariwisata, dan industri yang dimana sebagian besar air yang dipakai adalah sumber air utama, khususnya air sungai, sementara kesiapan sumber daya air sungai cenderung semakin menyusut kualitas dan kuantitasnya, hal ini terjadi sebab semakin jarangya daerah tangkapan air dan timbulnya pencemaran air di sungai (Auliya, 2014). Sungai dapat dilihat sebagai sebuah sistem alami yang menjadi tempat berlangsungnya proses-proses biofisik hidrologis maupun kegiatan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat yang kompleks sehingga pencemaran air di sungai dapat menyebabkan dampak yang sangat besar. Pencemaran air di sungai-sungai Kabupaten Sleman sangat memprihatinkan, berdasarkan pantauan dan penelitian yang dilakukan (Yuliana, 2012). Kondisi Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Gajah Wong terlihat kotor, tercemar limbah, dan berbau sampah yang menyengat. Selain itu, air juga terlihat keruh, hijau, dan sedikit berbusa. Kemudian lebih lanjut pemantauan tersebut kemudian diteliti sehingga mendapatkan hasil bahwa kualitas air pada sungai tersebut berada di atas ambang batas yang telah ditetapkan, terutama pencemaran *Biological Oxygen Demand* (BOD), dan *Chemical Oxygen Demand* (COD).

Perkembangan sektor pariwisata yang pesat mendorong para investor untuk berinvestasi melalui usaha-usaha kepariwisataan khususnya hotel. Jumlah hotel berbintang

di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2016 yaitu sebanyak 32 unit (BPS, 2017). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sleman merupakan daerah yang memiliki jumlah hotel terbanyak dibanding daerah kabupaten yang lain di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kemudian dari tabel berikut ini maka dapat diketahui peningkatan jumlah hotel berbintang mulai marak terjadi sejak tahun 2012. Pertumbuhan jumlah hotel yang terus mengalami kenaikan memberikan dampak buruk bagi lingkungan terutama sungai, dikarenakan limbah-limbah dari kegiatan perhotelan tersebut dilepaskan ke sungai, meskipun setiap hotel mengharuskan mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Namun jumlah air limbah hotel yang dibuang ke sungai bervolume sangat besar, yang akan menyebabkan pencemaran air sungai, dan jumlah pembangunan hotel semakin banyak (WALHI, 2014).

Berdasarkan grafik bahan pencemar Sungai Code tahun 2010-2016 menunjukkan bahwa bahan pencemar yang mencemari Sungai Code cenderung turun naik. Bahan pencemar pada tahun 2011 mengalami kenaikan dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan yang kemudian disusul dengan penurunan pada tahun 2013, kemudian mengalami kenaikan yang drastis pada tahun 2014, kemudian menurun lagi pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 bahan pencemar berupa detergen, *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Biological Oxygen Demand* (BOD), dan TDS mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kondisi instalasi pengolahan air limbah beberapa hotel di Kabupaten Sleman tidak dapat beroperasi secara optimal akibat beban sampah yang berlebihan (*overload*) dan timbunan sampah yang tidak sempurna sehingga menyebabkan penyaringan limbah yang tidak maksimal, yang mengakibatkan tercemarnya zat berbahaya pada sungai akibat limbah cair hotel (Bahruddin, 2015).

Tingginya angka pencemaran yang berasal dari limbah cair hotel dikarenakan masih banyaknya pihak manajemen hotel yang belum mengelola limbah cair secara tepat dan benar serta lambatnya birokrasi menangani masalah yang umum terjadi (Purnomo, 2016). Hotel harus memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), yang harus serasi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2001, tentang standarisasi pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Limbah cair yang telah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah diperbolehkan dibuang ke media lingkungan seperti sungai atau kali dengan izin tertulis dari Walikota dan telah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Secara umum, Undang-Undang Nomor 1 mengatur kebijakan pengendalian pencemaran yang disebabkan oleh air limbah hotel. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam peraturan tersebut upaya yang dilakukan dengan melalui kebijakan pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, program pengawasan dan pembinaan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman selaku pelaksana teknis kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian limbah cair hotel. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi kebijakan pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam pengendalian air limbah hotel di Kabupaten Sleman tahun 2019 dan untuk melengkapinya penelitian ini juga mencoba menggali secara kritis faktor-faktor apa saja yang menghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam melakukan pengelolaan limbah cair hotel di Kabupaten Sleman.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana tata kelola penanggulangan limbah hotel sebagai upaya pengendalian kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sleman pada tahun 2019-2020?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan tata kelola penanggulangan limbah hotel yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam pengendalian limbah cair hotel di Kabupaten Sleman tahun 2019.
- b. Memberikan penjelasan tentang bagaimana dampak limbah cair hotel terhadap lingkungan sekitar pembangunan hotel.
- c. Memberikan solusi dan rekomendasi bagi pemerintah tentang penanganan yang diakibatkan adanya pembangunan hotel.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi perkembangan ilmu dan kajian strategi kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pengendalian limbah cair.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam rangka mengkaji dan membenahi proses strategi pengendalian limbah cair hotel.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan guna menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagai persyaratan mendapat Gelar Sarjana pada program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

1.4 Kajian Pustaka

Pertama, Kajian berjudul "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Pengelolaan Sampah Kota (Amdal) (Studi Kunjungan Masyarakat AMDAL oleh TPA Ngronggo Salatiga)" oleh (Sulistiyowati, 2006). Berharap pengelolaan lingkungan untuk memecahkan tantangan masalah lingkungan, termasuk permasalahan pengelolaan sampah kota, termasuk dampak lingkungan, partisipasi masyarakat dan partisipasi dalam analisis TPA. Dari perspektif sosial Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), salah satu tugas penting adalah menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Metode ini tidak membutuhkan analisis ilmiah yang kompleks, sebab membutuhkan lebih banyak keterampilan organisasi dan komunikasi serta memiliki kemampuan untuk mengerti sikap, keyakinan, dan nilai-nilai anggota masyarakat yang mungkin terpengaruh oleh proyek. Dalam proses pengembangan, perspektif sosial AMDAL lebih berfungsi dari pada pengembangan AMDAL itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif.

Proyek yang dilaksanakan di TPA Ngronggo Kecamatan Kumpulrejo Salatiga Lingkupnya meliputi masalah dampak lingkungan, terutama yang terkait dengan sektor sosial budaya. Faktor penelitian meliputi aspek sosial seperti pengelolaan TPA, AMDAL, respon, dan partisipasi masyarakat, selanjutnya dianalisis dari aspek sosial dan hukum. Pertama-tama kegiatan pengelolaan sampah TPA Ngronggo memakai sistem pembuangan terbuka, kemudian sesuai dengan persyaratan Keputusan Menteri Negara Nomor 17 Tahun 2001, AMDAL dikaji dengan memakai sistem sanitary landfill, walaupun penerapannya belum selesai. Tugas serta masyarakat sejalan dengan AMDAL kegiatan TPA Ngronggo terlihat pada kesempatan usaha di TPA. Pemerintah Kota Salatiga secara umum telah memberi naungan hukum terhadap masyarakat sekitar TPA Ngronggo baik pada bidang agrarian, hukum, kesehatan lingkungan dan perlindungan lingkungan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Tias, 2009) berjudul “Efektifitas Amdal dan Ukl Upl dalam Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Kudus”. Kudus adalah salah satu daerah paling kecil di Jawa Tengah, Perekonomian di Kabupaten Kudus ditumpu oleh bermacam bidang terutama bidang industri terkhusus industri rokok, kemudian Kota Kudus diberi gelar kota kretek. Hingga sampai saat ini tidak semua perusahaan di Kabupaten Kudus mempunyai data pengelola lingkungan. Tingkat kepatuhan pengusaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan masih sangat kecil. Selanjutnya, penegakkan hukum juga sangat lemah, dan belum ada juga sanksi yang jelas terhadap perusahaan yang sudah atau belum melakukan pengelolaan wilayah lingkungan. Berdasarkan pada hal tersebut dibutuhkan penelitian untuk mengetahui

bagaimana efektifitas implementasi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan UKL UPL.

Tujuan penelitian ini agar memahami dan menguji pelaksanaan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan UKL UPL pada perusahaan yang telah mempunyai dokumen lingkungan, dan merupakan gambaran partisipasi warga dalam mendukung pengelolaan wilayah lingkungan dan pengamatan pemerintah daerah. Penelitian dilakukan pada beberapa sampel yang dipilih dengan memakai teknik survei dan teknik analisis deskriptif.

Ketiga, Penelitian berjudul "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Daha Selatan" oleh (Riswan et al., 2015). Di Distrik Daha Seradan, Distrik Hulu Shuangxi Seradan, beberapa warga sembarangan membuang sampah di sekeliling rumah atau di sungai telah menjadi budaya, memunculkan bermacam-macam penyakit dan mencemari sungai. Oleh sebab itu, perlu mengadakan penelitian pengelolaan sampah berdasarkan teknis operasional, kelembagaan, dan peran serta masyarakat. Studi analisis observasional ini memiliki tujuan agar mengkaji pengelolaan sampah rumah tangga dan faktor-faktor lainnya yang terkait dan rencana pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat. Hasilnya didapatkan rata-rata sampah rumah tangga yang dihasilkan sebanyak 1,46 liter/orang/hari atau 0,38 kg/orang/hari, yang terdiri dari 47% sampah organik, 15 % kertas, 22% plastik, serta 16% logam, dan sebagainya.

Manajemen sampah di Kabupaten Daha Selatan belum terlaksana secara maksimal. Tingkat pendapatan dan pendidikan, perilaku bersih lingkungan, pengetahuan tentang peraturan sampah, dan ketersediaan untuk membayar remunerasi

sampah berhubungan positif dengan pengelolaan sampah rumah tangga. Saran itu antara lain meningkatkan pelayanan persampahan, pembentukan tim pengelolaan persampahan perdesaan, melibatkan masyarakat dan pihak swasta dalam penggalangan dana.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh (Elamin et al., 2018), berjudul “Analisis Pengelolaan Sampah pada Masyarakat Pedesaan Disanah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Tiga Negara”. Sampah merupakan objek yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang yang bergerak dan berkegiatan pasti akan menciptakan sampah, seperti yang terjadi di Desa Disanah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang. Masalah pada penelitian ini yaitu karena teknik pengelolaannya dilakukan melalui teknik pembuangan dan pembakaran yang tidak tepat, maka teknik pengelolaan sampah yang dilakukan belum pada kelompok yang benar. Tujuan penelitian ini agar memahami rencana pengelolaan sampah di Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Teknik penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan rancang bangun observasional deskriptif. Teknik penelitian yang dilakukan dengan cara survei lapangan, focus group discussion yang melibatkan partisipan, wawancara terbuka, dan studi literatur. Anggota yang digunakan dalam penelitian ini adalah perwakilan dari Badan Lingkungan Hidup, kepala desa, lembaga perwakilan desa, organisasi kepemudaan, dan organisasi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di desa tersebut masih kurang baik karena belum adanya lahan untuk tempat penampungan sementara, sarana dan prasarana yang kurang baik, serta pemahaman masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang tepat dan benar masih rendah. Masukan yang dapat diajukan

adalah melakukan sosialisasi terkait pengelolaan sampah yang benar dan tidak benar, pembersihan rutin jadwal gotong royong desa, dan menambahkan anggaran untuk pengadaan tanah yang akan digunakan untuk tempat penampungan sementara.

Kelima, Laporan penelitian yang ditulis oleh (Sulistiyorini et al., 2015) berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Margaluyu Desa Cicurug. Dengan meningkatnya total produk dan bertambahnya konsumsi masyarakat maka produksi sampah semakin meningkat setiap hari. Untuk mengatasi peningkatan kapasitas sampah perlu dilakukan upaya pengurangan kapasitas sampah dari asalnya melalui pemberdayaan masyarakat. Masalah partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah adalah wujud pengendalian yang berhubungan dengan pengelolaan sampah di lingkungan Margaluyu, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian tentang pengelolaan sampah berdasar partisipasi masyarakat di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug, Tujuan untuk: (1) menggambarkan bentuk partisipasi masyarakat di Lingkungan Margaluyu. (2) menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat di Lingkungan Margaluyu metode pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Bersumber pada hasil penelitian, salah satu bentuk penyertaan masyarakat dalam perbaikan lingkungan adalah melalui kontribusi kerja iklas dan partisipasi dalam pengelolaan sampah. Selain itu, mereka juga mengadakan Temu penduduk sebulan sekali dengan sebagian penduduk di tingkat RW dan seluruh warga di tingkat RT. Dalam hal ini tingkat RT cenderung mengambil bentuk partisipasi langsung, sedangkan tingkat RW cenderung mengambil bentuk partisipasi tidak langsung.

Warga benar-benar bebas stres saat melakukan aktivitas tersebut. Kualitas partisipasi masyarakat yang terjadi pada masyarakat Margaluyu di Desa Cicurug terbagi dalam kategori sedang, masyarakat sudah ikut berpartisipasi, namun implementasinya masih belum optimal.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh (Mukti & Efendi, 2020) yang berjudul Kampung Hijau Gambiran: Praktik tata Kelola Lingkungan Hidup berbasis Collaborative Governance. Melalui identifikasi stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup Kampung Hijau Gambiran Pandeyan Umbulharjo Kota Yogyakarta terdapat stakeholder yang bersifat primer dan sekunder. Stakeholder primer mempunyai peran langsung dan mungkin keberadaannya akan berpengaruh penting dalam keberlanjutan Kampung Hijau Gambiran. Sedangkan stakeholder sekunder dalam beberapa kesempatan melakukan kolaborasi, namun keberadaannya tidak berpengaruh besar terhadap Kampung Hijau Gambiran. Pengelolaan lingkungan hidup Kampung Hijau Gambiran, Pandeyan Umbulharjo, Kota Yogyakarta belum sepenuhnya menjalankan prinsip kolaborasi dengan melibatkan dari ketiga pilar governance. Terbukti, intensitas hubungan antara masyarakat pengelola (komunitas Kampung Hijau Gambiran) dan pemerintah lebih erat dibandingkan hubungan antara masyarakat dengan institusi swasta atau pemerintah dengan institusi swasta. Derajat keterlibatan ketiga pilar governance (pemerintah, masyarakat dan institusi swasta) dalam melakukan kolaborasi berbeda. Pemerintah melakukan kolaborasi hampir diseluruh aspek pengelolaan Kampung Hijau Gambiran selaku fasilitator, pendanaan dan pendampingan. Hal itu disebabkan sebagai bentuk menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan kepada masyarakat untuk

meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Institusi swasta hanya sebatas pendanaan dan pengadaan pelatihan yang tidak keberlanjutan karena tidak ada keuntungan profit maupun motivasi bisnis yang dapat diambil dari pengelolaan tersebut. Sedangkan masyarakat sebagai penyedia lahan, pemanfaatan fasilitas, objek pelatihan dan pemberdayaan serta pemeliharaan fasilitas Kampung Hijau Gambiran.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh (E. P. Purnomo et al., 2016) yang berjudul Ekologi Pemerintahan: Tata Kelola dan Kelembaman Birokrasi Dalam Menangani Kebakaran Hutan, Pengelolaan Sawit Serta Peranan Elit Lokal. Indonesia mempunyai sekitar 10,5 juta ha perkebunan kelapa sawit, sekitar 44% merupakan milik perkebunan rakyat, 49% milik perusahaan swasta (PBS) dan 7% milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkebunan. Secara umum, dapat diperkirakan bahwa 56% perkebunan (PBS dan BUMN) tersebut mempunyai praktik agronomi, termasuk praktik pembukaan lahan, yang lebih baik dari pada perkebunan rakyat, karena didukung permodalan yang lebih kuat dan jaringan perusahaan yang lebih luas. Perkebunan rakyat/Small Medium Scale Agriculturalists (SMAs) ini menurut pengamatan Tim Penulis diasumsikan mempunyai praktik agronomi yang kurang baik dan dikuasai oleh para elit lokal. Karhutla berasal dari berbagai sumber, diantaranya kondisi yang memungkinkan (kekeringan ekstrim, kurang sumber air, lahan gambut yang kering) dan pemicu yang menyebabkan (praktik slash and burn SMAs, faktor manusia seperti konflik, hal yang tidak disengaja). Fokus pemerintah adalah pembinaan dan penegakan ke PBS, sangat kurang ke SMAs. SMAs dikuasai oleh elit lokal (pejabat pemerintah lokal). Praktik yang tidak bertanggung jawab dari SMAs ini menyebabkan pemerintah daerah mengalami kelembaman birokrasi (dari kelalaian/

omission atau kesengajaan/ perintah/ commission dari aparat pemerintah daerah dan aparat pusat di daerah).

Kedelapan, penelitian yang berjudul Analisis Dampak Pembangunan Hotel dan Apartemen Terhadap Sanitasi Lingkungan di Kabupaten Sleman (Studi Kasus : Masyarakat Sekitar Pembangunan Apartemen dan Condotel The Palace) yang dilakukan oleh (Maryani, 2019). Pembangunan hotel dan apartemen Apartemen dan Condotel The Palace berdampak besar bagi masyarakat lingkungan sekitar. Dampak akses air, limbah, struktur bangunan maupun sosial dan budaya. Untuk itu pihak swasta perlu memberikan tanggung jawab kepada masyarakat sekitar. Peran pemerintah juga sangat diperlukan dalam memeberikan izin pembangunan (AMDAL). Pihak swasta selaku investor harus mejalani prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku. Agar tidak terjadi Pro dan Kontra di wilayah tempat pembangunan. Selain itu, diharapkan juga bagi pemerintah untuk melakukan pengendalian dan pengontorolan pembangunan hotel dan apartemen. Agar Kabupaten Sleman tetap nyaman untuk ditinggali masyarakatnya.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh (Pramana, 2017) yang berjudul Analisis Faktor yang Berpengaruh Terhadap Nilai Lahan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Studi Kasus: Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai lahan di wilayah studi kasus, yakni di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan menggunakan metode Hedonic Price Model (HPM) Tradisional berbasis analisis regresi linier berganda, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa faktor yang secara signifikan berpengaruh

terhadap harga lahan di lokasi studi kasus. Pada atribut karakteristik fisik, hanya status guna lahan yang tertera di dalam sertifikat tanah yang secara signifikan berpengaruh terhadap nilai lahan. Suatu bidang lahan akan bernilai 55,5% lebih tinggi apabila berstatus guna lahan SHM Pekarangan. Sementara pada atribut aksesibilitas, jarak dari kampus perguruan tinggi, jarak dari terminal bus, kelas jalan, dan jenis perkerasan jalan merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai lahan. Nilai lahan akan lebih tinggi apabila berlokasi semakin jauh dari kampus perguruan tinggi. Hasil yang berkebalikan dengan pandangan umum yang berlaku ini dapat dijelaskan melalui kemungkinan terjadinya eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari aktivitas di fasilitas pendidikan, seperti kebisingan dan kemacetan. Sementara temuan berupa pengaruh yang signifikan dari variabel jarak dari terminal bus dan kondisi perkerasan jalan menunjukkan kesesuaian dengan teori nilai lahan, dimana aksesibilitas menjadi faktor utama yang memberikan pengaruh terhadap nilai lahan. Temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa nilai lahan tiga kali lipat lebih tinggi apabila berlokasi di tepi jalan yang berstatus jalan provinsi merefleksikan karakteristik pasar lahan di wilayah perkotaan Yogyakarta pada umumnya dan di lokasi studi kasus pada khususnya. Melihat hasil dari pemodelan statistik tersebut, terlihat bahwa lahan-lahan yang terdapat di tepi jalan provinsi memiliki kemungkinan lebih besar untuk beralih fungsi lahan mengingat lahan-lahan yang bernilai tinggi tersebut cenderung akan dialokasikan oleh mekanisme pasar lahan untuk aktivitas-aktivitas yang menghasilkan perputaran uang yang tinggi.

Kesepuluh, penelitian yang berjudul *Kajian Dampak Lingkungan Terhadap Rencana Kegiatan Pembangunan Apartemen, Hotel, dan Area Komersil Olympic City*

Bogor yang dilakukan oleh (Khaerulyansyah et al., 2014) . Dampak yang ditimbulkan pada tahap prakonstruksi adalah perubahan persepsi masyarakat dan keresahan masyarakat, sedangkan dampak yang ditimbulkan pada tahap konstruksi adalah penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air permukaan, peningkatan limpasan air, kesempatan kerja, peluang berusaha, peningkatan pendapatan masyarakat, keresahan masyarakat, perubahan persepsi masyarakat dan peningkatan pendapatan lalu lintas. Pencegahan yang dilakukan pada pembangunan apartemen, hotel, dan area komersil *Olympic City* Bogor dengan melakukan cara-cara untuk meminimalisir dampak dengan melalui pendekatan teknologi, pendekatan sosial dan pendekatan institusi.

Persamaan penelitian dalam jurnal dan tema diatas adalah objek penelitian yang sama, yaitu membahas tentang limbah cair hotel. Adapun perbedaan penelitiannya yaitu terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh beberapa jurnal dan tema diatas ialah memonitoring kebijakan limbah cair hotel, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah tata kelola penanggulangan limbah hotel sebagai upaya pengendalian kualitas lingkungan hidup.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Tata Kelola Pemerintahan

1.5.1.1 Pengertian Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep tata kelola pemerintahan, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai

pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Tata Kelola Pemerintahan menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.

Dapat dikatakan bahwa tata kelola pemerintahan adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

1.5.1.2 Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita tata kelola pemerintahan pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara. Namun cita tata kelola pemerintahan kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip tata kelola pemerintahan adalah

untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan tata kelola pemerintahan, yaitu:

1. Partisipasi

Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan. Karena tanpa partisipasi orang tua, pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu bisa mengatasinya.

2. Penegakan hukum

Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikutan sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.

3. Transparansi

Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percekocokan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek baik di bidang kebijakan, baik di bidang keuangan ataupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.

4. Responsif

Salah satu untuk menuju cita tata kelola pemerintahan adalah responsif, yakni supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan, atasan juga harus bisa memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan sampai supervisor menunggu staf-staf menyampaikan keinginan-keinginannya. Supervisor harus bisa menganalisa kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan kepentingan bersama.

5. Konsensus

Aspek fundamental untuk cita tata kelola pemerintahan adalah perhatian supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara konsensus, di mana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian mufakat). Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.

6. Kesetaraan dan keadilan

Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan para staf-staf didalam perlakuannya, di mana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya.

7. Efektifitas dan efisien

Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna, efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalitas untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga. Di mana efektifitas dan efisien dalam proses pendidikan, akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.

8. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.

9. Visi Strategi

Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada.

1.5.2 Tata Kelola Lingkungan Dalam Pengelolaan Limbah

1.5.2.1 Pengertian Limbah

Limbah merupakan buangan yang bersifat kotor yang berasal dari rumah tangga dan juga berasal dari industri, air tanah, air permukaan serta buangan lainnya, dengan

demikian air buangan tersebut merupakan sesuatu yang bersifat kotoran umum (Utubira et al., 2006).

Sedangkan menurut (Endro & Oktiawan, 2009), air limbah atau yang dikenal dengan air buangan merupakan:

a) Limbah cair atau air buangan adalah cairan buangan yang berasal dari rumah tangga, perdagangan, perkantoran, industry maupun tempat-tempat umum lainnya yang biasanya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan atau kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian hidup.

b) Kombinasi dari cairan atau air yang membawa buangan dari perumahan, institusi, komersial, dan industri bersama dengan air tanah, air permukaan, dan air hujan.

c) Kotoran dari masyarakat dan rumah tangga, industri, air tanah/permukaan serta buangan lainnya (kotoran umum).

d) Cairan buangan yang berasal dari rumah tangga, perdagangan, perkantoran, industri maupun tempat-tempat umum lainnya, dan biasanya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan/kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

e) Semua air/zat cair yang tidak lagi dipergunakan, sekalipun kualitasnya mungkin baik.

Lebih lanjut limbah cair hotel adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan hotel yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan (Herlan Martono, 2007). Limbah hotel memiliki karakteristik yang berbeda

dengan limbah cair rumah tangga, karena potensi limbah tersebut tidak hanya berasal dari kegiatan dapur, tetapi juga kegiatan kantor, kamar hotel, kolam renang dan laundry (Disyamto et al., 2014).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat diketahui limbah cair adalah merupakan sisa buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Lebih lanjut limbah cair hotel merupakan sisa buangan dari aktivitas perhotelan yang berwujud cair.

1.5.2.2 Dampak Limbah Perhotelan

Air yang sudah tercemar juga dapat mengganggu ekosistem alam, limbah cair yang mengotori air bisa membunuh bakteri-bakteri baik yang memiliki fungsi menjernihkan air. Selain itu, tumbuhan dan makhluk hidup yang tinggal di air pun turut terbunuh akibat oksigen yang semakin menipis di dalam air dan tingginya zat kimia yang terkandung dalam air (Parker & Sutherland, 2014).

Secara umum air limbah hotel dapat menimbulkan berbagai dampak yang cukup merugikan bagi manusia. Dampaknya dapat menyebabkan atau menimbulkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan limbah cair hotel adalah sebagai berikut:

1) Penyakit diare dan tipus

Penyakit ini terjadi karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan yang tidak tepat.

2) Penyakit kulit (kudis dan kurap)

Cairan dari limbah yang masuk ke sungai akan mencemarkan airnya sehingga mengandung virus-virus penyakit, berbagai ikan dapat mati sehingga mungkin lama kelamaan akan punah, tidak jarang manusia juga mengkonsumsi atau menggunakan air untuk kegiatan sehari-hari, sehingga manusia akan terkena dampak limbah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ciri khusus akibat dampak limbah bagi kesehatan yaitu proses penularan yang umumnya melalui mulut, dikarenakan limbah hotel mengandung bakteri pathogen seperti E.coli maka ada beberapa penyakit yang paling sering terjangkiti antara lain, yaitu Disentri, Tifus dan Paratifus, Kholera, Hepatitis A, Poliomyelitis Anterior Akut (Mallongi, 2017).

Pengolahan limbah hotel sangat penting untuk mengurangi penyebaran penyakit menular yang disebabkan oleh organisme pathogen dalam limbah dan untuk mencegah pencemaran air permukaan dan air tanah. Perlakuan air limbah dilakukan oleh kombinasi dari unit proses fisik, kimia dan biologi, sebelum limbah cair dibuang dengan aman ke lingkungan (Sadi & Adebitan, 2014).

1.5.2.3 Pengelolaan Limbah

Menurut (Sertifikasi et al., 2004) di dalam sebuah organisasi dibutuhkan adanya tata kelola dan pemahaman mengenai limbah yang ada di industri perhotelan. Tata kelola yang dimaksud adalah penggunaan dan penerapan ilmu manajemen. Dalam sistem manajemen ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak Hotel dalam memanajemen limbah (Rheinland, n.d.). Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Adanya instruksi khusus tentang pemisahan limbah dan manajemen limbah internal di lokasi tertentu seperti kamar, dapur, restoran, bar, lokasi engineering, sekitar taman, kolam renang, area parkir dan lain-lain.
2. Memastikan bahwa limbah dipisahkan mulai dari tempat asal limbah dihasilkan. Pemisahan limbah dilakukan dengan menyediakan tempat sampah dengan warna yang berbeda-beda berdasarkan klasifikasi limbah di kamar, dapur, restoran dan lain-lain.
3. Terdapat tempat penyimpanan limbah yang sesuai untuk setiap jenis-jenis limbah.
4. Jenis dan jumlah limbah yang dihasilkan di hotel diukur dan dicatat secara teratur.
5. Limbah organik hotel diolah menjadi kompos di lokasi hotel atau adanya fasilitas eksternal untuk pembuatan kompos tersebut.
6. Penggunaan perangkat penghancur untuk pengurangan volume limbah (kaleng, tetra pack dan lain-lain).
7. Limbah organik, kaca, kertas atau karton, bungkus metal dan tekstil dipisahkan dan dikirim kepada kolektor yang cocok untuk digunakan kembali atau didaur ulang.
8. Limbah berbahaya disimpan, dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dibuang melalui operator yang memiliki izin. Limbah berbahaya yang dimaksud adalah minyak goreng bekas pakai, baterai, lampu fluorescent, sisasisa cat, pelumas bekas pakai (oli mesin dan lain-lain), toner dan katrid tinta. Penanganan limbah berbahaya didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.85 Tahun 1999.

9. Mengambil langkah-langkah untuk mengurangi limbah, seperti meningkatkan kesadaran tamu dan pembelian produk menggunakan kemasan yang dapat dikembalikan atau penggunaan produk kemasan besar.

10. Menghindari penggunaan wadah sekali pakai atau paket porsi untuk produk-produk seperti kaleng, susu untuk kopi, madu, gula, garam, keju, mayonnaise, mustard, kecap, sabun, bath gel, sampo.

11. Menggunakan botol yang dapat dikembalikan sebagai pengganti botol sekali pakai atau kaleng.

1.6 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1.6.1 Definisi Konseptual

1. Tata Kelola Pemerintahan

Tata Kelola Pemerintahan diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik.

2. Tata Kelola Lingkungan Dalam Pengelolaan Limbah

Pengelolaan limbah hotel bertujuan untuk mengurangi penyebaran penyakit menular yang disebabkan oleh organisme patogen dalam limbah dan untuk mencegah pencemaran air permukaan dan air tanah. Sebelum dilakukannya pengelolaan limbah, dibutuhkan pengelompokan karakteristik limbah terlebih dahulu kemudian mencari sumber limbah agar proses pengelolaan dilakukan dengan mudah.

1.6.2 Definisi Operasional

Tabel 1.2

| Variabel | Indikator |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Transparansi | <ol style="list-style-type: none">1. Adanya sistem informasi online untuk pelaporan masalah lingkungan.2. Adanya panduan-panduan teknis dalam menyelesaikan masalah lingkungan.3. Adanya SOP (Standar Operasional Prosedur).4. Adanya sanksi. |
| 2. Partisipasi | <ol style="list-style-type: none">1. Keterlibatan asosiasi hotel dalam menanggulangi masalah lingkungan.2. Adanya pelibatan warga dilokasi terdampak.3. Adanya regulasi yang mengatur keterlibatan unsur masyarakat di dalam menangani persoalan lingkungan. |
| 3. Akuntabilitas | <ol style="list-style-type: none">1. Adanya laporan kinerja secara berkala yang dapat diakses publik.2. Adanya dokumen evaluasi kerja.3. Adanya mitigasi persoalan ekologi. |
| 4. Koordinasi | <ol style="list-style-type: none">1. Adanya sistem koordinasi lintas sektoral dalam penanganan masalah limbah hotel.2. Adanya SKPD sebagai kordinator pelaksana tugas.3. Adanya forum-forum stakeholder yang secara reguler dan insidental terlibat dalam koordinasi. |

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, Creswell menyatakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menganalisis sebuah struktur alur bacaan, kata-kata dan beberapa laporan lainnya dengan menggunakan deskripsi. Selain itu, penelitian kualitatif juga menggunakan analisis kalimat induktif. Pada penelitian kualitatif, teori digunakan sebagai sebuah alat analisis data. Teori tersebut sebagai landasan yang kemudian digunakan dalam olah data, sekalipun pada penelitian tertentu masih ada metode olahdata turunan, namun masih dalam koridor konsep teori yang digunakan. Dengan demikian, pada penelitian kualitatif sangat terpacu pada sebuah teori yang digunakan, lengkap dengan paradigma teori tersebut. Penelitian kualitatif dilakukan pada sebuah kondisi sosial-masyarakat dengan menganalisis secara rinci, hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menganalisis sebuah korelasi. Dengan demikian, penelitian kualitatif cenderung digunakan dalam penelitian sosial yang bersifat perubahan sosial, akulturasi, asimilasi, atau sinkretisme. Bukan hanya itu, dalam tataran kelembagaan, penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis strategi atau rencana sebuah lembaga tersebut. Sedangkan penelitian kuantitatif menganalisis kinerja dari sebuah lembaga. Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif guna menganalisis sebuah strategi dan program kerja dari pemerintah dalam melakukan siasat lingkungan akibat pesatnya pembangunan pariwisata. Maka dari itu, penelitian ini lebih mengarah kepada studi case tunggal. Studi case tunggal merupakan sebuah penelitian dengan menganalisis sebuah fenomena tunggal.

Penelitian dengan studi kasus merupakan upaya untuk menganalisis unit-unit terkecil, mulai dari variabel teori hingga indikatornya. Selain itu, penelitian ini juga membutuhkan studi terdahulu, tujuannya adalah untuk mempermudah analisis dialektika atau alur pikir. Dengan menggunakan sebuah studi kasus, penelitian kualitatif dinilai sangat rinci dalam menganalisis fenomena sosial. Beberapa data penemuan di lapangan juga digunakan untuk memperkuat argumentasi analisis. Dengan demikian, keakuratan data dan korelasinya dengan teori sangat dibutuhkan dalam penelitian kualitatif.

Alasan yang lainnya adalah dalam penelitian ini peneliti membutuhkan sebuah analisis yang mendalam dalam memahami efek sosial yang terjadi. Mulai dari kondisi sebuah lembaga, kinerja lembaga pemerintah, hingga respon masyarakat yang paling penting. Hal ini disebabkan bahwa penelitian kualitatif sangat fleksibel dalam mengolah data, tidak terpaku pada sebuah konsep angka-angka korelasi antar variabel, tetapi lebih mengarah pada sebuah analisis mendalam dengan pembagian variabel teori. Dengan demikian, peneliti memilih desain penelitian kualitatif dalam menganalisis efek lingkungan akibat dari pesatnya pembangunan pariwisata di Yogyakarta.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis mengambil lokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Alasan penulis mengambil lokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman karena di Kabupaten Sleman sangat banyak berdiri hotel-hotel bintang maupun non bintang yang menghasilkan limbah cair, kemudian Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu stakeholder yang berwenang dalam pengendalian limbah cair.

1.7.3 Sumber Data

Pada penelitian ini data bersumber dari 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan pada data sekunder diambil dari buku dan studi literatur. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian melalui wawancara dengan pejabat/staff Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat dari kajian-kajian sumber yang digunakan sebagai penunjang data primer dalam menganalisa masalah-masalah yang akan diteliti berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan diteliti.

1.7.4 Unit Analisis

Dalam penelitian ini mengkaji tentang efektivitas pemerintah terhadap dampak limbah hotel di Kabupaten Sleman Tahun 2019, maka unit analisis data dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

1.7.5 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah upaya untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan kajian studi kasus dan teori. Teknik ini memudahkan peneliti dalam mengambil data secara komprehensif. Dengan demikian, teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dalam proses penelitian. Berikut merupakan rincina teknik pengumpulan data pada penelitian ini:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung; nmaun seiring berjalannya waktu, wawancara dapat dilakukan

dengan menggunakan media aplikasi online. Peneliti melakukan wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disusun secara rinci. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam atau biasa disebut sebagai *in-depth interview*. Teknik ini merupakan proses pengambilan keterangan secara langsung. Kelebihan dari teknik ini terdapat pada akurasi data yang dihasilkan. Pihak yang diwawancarai akan lebih leluasa dan jujur dalam proses wawancara, daripada secara online atau lewat telepon.

Pada tahapan wawancara subyek wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman
2. Kepala Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Dnas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sleman
3. Staff Seksi Pemantauan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Sleman
4. Warga setempat

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah pengambilan data dengan melakukan analissi terhadap dikumen seprti buku, regulasi, dan bisa jadi gambar atau foto-foto lapangan. Dokumentasi akan mendukung argumen dari wawancara, dan membuat data penelitian lebih kredibel dan akuntabel. Maka dari itu, dokumentasi merupakan instrumen pendukung sebuah teknik pengambilan data.

c. Observasi

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik partisipasi pasif. Observasi pasif merupakan upaya yang dilakukan peneliti dengan cara hadir secara langsung ditempat atau lokasi tertentu, namun tidak ikut secara langsung dalam melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Teknik ini merupakan lawan dari PAR (participatory action reseac) yang melakukan observasi secaraintensif dengan ikut andil berkegiatan.

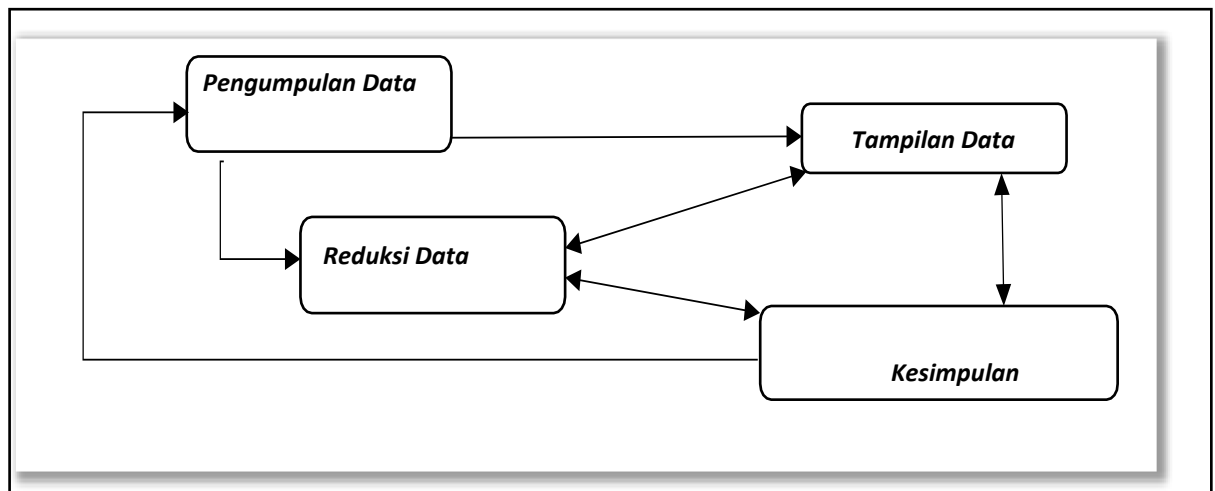
1.7.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengatakan bahwa analisis data dilakukan dengan pengumpulan data secara langsung. Pengumpulan data tersebut dilakukan pada periode waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu. Selain itu, teknik ini memaksa peneliti untuk melakukan pengambilan data dengan intensif sampai memperoleh titik kejenuhan, “titik jenuh” yang dimaksud dalam proses ini adalah ketika data yang diambil telah komprehensif atau tidak ada data yang perlu diambil lagi. Dari pernyataan Miles dan Huberman tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan data dilapangan harus dilakukan dengan intensif, penuh waktu dan menyeluruh. Apabila peneliti semakin lama mengambil data maka proses ini akan maksimal, namun dengan catatan bahwa proses pengambilan data masih dalam koridor konsep dan teori yang telah dipilih sebelumnya. Hal ini berguna sebagai upaya untuk menekan konsistensi pemikiran atau metodologi penelitian. Selain itu, juga berguna agar pembahasan tidak melebar.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang mengandalkan data deskriptif didalamnya. Pengumpulan data dilapangan pun bermacam-macam cara yang dapat dilakukan atau dapat disebut triangulasi kemudian mampu

dilaksanakan secara terus menerus hingga datanya jenuh. Lebih spesifik lagi dapat diartikan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam lingkup-lingkup, menjabarkan ke dalam bagian-bagian, melakukan sintesa, kemudian menyusunnya ke dalam bentuk yang sudah ditentukan atau data yang bersifat penting dan fokus pada tujuan penelitian, dan menyusun kesimpulan yang mampu dimengerti peneliti maupun orang lain.¹ Dengan mendasarkan pada penjabaran diatas maka pada penelitian ini lebih mengarah pada teknik analisis data model Miles dan Huberman² sebagai berikut :

Gambar 1.1



Bagan 1 Pola Teknik Analisis Data

Sumber: Sugiono. 2012

¹ Ibid, hlm. 333

² Ibid, hm. 334-33